**ARSITEKTUR PERDAMAIAN DI KOTA AMBON**

**(Membaca Dinamika Perdamaian Setelah Sepuluh Tahun Konflik Maluku)**

**Saidin Ernas**

Dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

ernassaid@gmail.com

**Abstract**

*The dynamics of peace in Ambon during the last ten years is getting stronger, but the extent of this phenomenon can be considered as a solid basis for peace, would require critical analysis. This paper is the result of field research on peace in Ambon utilizing from the theory of "peace architecture" developed by Luc Reychland (2006). Based on the results of the analysis of the obtained several important conclusions. First, the peace process in the city of Ambon has been going on participatory in various aspects of life. Second, in an architectural perspective imaginable Reychland peace, the peace in Ambon has had sufficient potential to develop into a structure of peace which is getting stronger. It is characterized by the strengthening of dialogue and communication between citizens of an increasingly inclusive, the effectiveness of public spaces such as markets, offices, schools and coffee shops as a medium mixing integrative. It is also supported by economic and political transformation of the practice of the accommodative. Third, that in line with the positive development, the public still need to be reminded to be wary of notions of identity as religious and political radicals that are harmful to the sustainability of peace.*

**Keywords:** architecture of peace, Maluku conflict, inclusive communication,Ambon.

**Abstrak**

*Dinamika perdamaian di kota Ambon selama sepuluh tahun terakhir semakin menguat, namun sejauh mana fenomena tersebut bisa dinilai sebagai dasar yang kokoh bagi bangunan perdamaian, tentu membutuhkan kajian kritis. Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang perdamaian di Ambon yang memanfaatkan teori “arsitektur perdamaian” yang dikembangkan oleh Luc Reychland (2006). Berdasarkan hasil-hasil analisis maka diperoleh beberapa kesimpulan penting. Pertama, proses perdamaian di kota Ambon telah berlangsung secara partisipatif dalam berbagai lini kehidupan masyarakat. Kedua, dalam perspektif arsitektur perdamaian yang dibayangkan Reychland, maka perdamaian di Ambon telah memiliki potensi yang cukup memadai untuk berkembang menjadi sebuah struktur perdamaian yang semakin kuat. Hal ini ditandai dengan menguatnya dialog dan komunikasi antar warga yang semakin inklusif, efektifitas ruang publik seperti pasar, kantor, sekolah dan warung-warung kopi sebagai media pembauran yang integratif. Hal ini juga disupport oleh transformasi praktik ekonomi dan politik yang semakin akomodatif. Ketiga, bahwa sejalan dengan perkembangan positif tersebut, publik masih perlu diingatkan untuk mewaspadai paham-paham keagaman radikal dan politik identitas yang berbahaya bagi keberlangsungan perdamaian.*

*Kata Kunci***: arsitektur perdamaian, konflik maluku, komunikasi inklusif, Ambon.**

**Pendahuluan**

Konflik yang melanda Maluku selama periode 1999-2004, akhirnya dapat dihentikan setelah melalui proses dialog yang panjang dan berliku. Terutama setelah Perjanjian Malino pada tahun 2002 yang berhasil mendorong pihak Muslim dan Kristen untuk berdamai.[[1]](#footnote-2) Secara perlahan hubungan sosial antara masyarakat di Kota Ambon kembali terjalin semakin intens. Sejak tahun 2005 kekerasan di kota Ambon semakin dapat ditekan ke titik terendah yang ditandai dengan semakin jarangnya aksi-aksi kekerasan antar kelompok agama. Disi lain, kelompok-kelompok perdamaian mulai tumbuh, baik di tingkat pemerintah daerah, *civil society,* hingga lembaga-lembaga pendidikan.

Fenomena sosial mutakhir yang terjadi di Ambon, tentu bisa disebut sebagai tanda positif tentang perdamaian. Namun sejauh mana fenomena tersebut menjadi fondasi yang kokoh bagi bangunan harmoni dan perdamaian, tentu memerlukan kajian khusus yang secara sepesifik mendalami tentang perkembangan terkini di kota Ambon, terutama tentang arsitektur perdamaian yang telah terbentuk di kota ini. Studi tentang arsitektur perdamaian sangat penting untuk menganalisis proses-proses perubahan yang telah terjadi setelah konflik. Sebab konsep arsitektur perdamaian bukan saja berbicara tentang integrasi sosial masyarakat majemuk yang berbeda agama dan etnis dalam sebuah identitas bersama, atau asimilasi antara kelompok minoritas dengan kelompok dominan. Tetapi lebih dari itu konsep arsitektur perdamaian sebagaimana dibicarakan Luc Reychland,[[2]](#footnote-3) dapat menunjukkan hal-hal subtansial seperti komunikasi yang semakin inklusif, aspek lingkungan yang integratif, *local leadership* yang semakin pro perdamaian dan bentuk-bentuk struktur sosial politik yang menjamin tumbuhnya hubungan sosial yang otentik, inklusif dan demokratis. Kajian tentang arsitektur perdamaian juga bisa digunakan untuk mencermati sejauhmana telah tumbuh moralitas baru yang menyokong harmoni dan perdamaian dalam masyarakat. Biku Parehk[[3]](#footnote-4) menyebutnya sebagai *moral contract* yang mengikat masyarat dalam sebuah sistem sosial yang seimbang (*socilal equilibrium*).

Konflik komunal yang berlangsung di Ambon dengan segala dampak yang telah ditimbulkannya harus menjadi pengalaman berharga untuk mengembangkan suatu struktur perdamaian yang lebih otentik dan partisipatif dalam kehidupan masyarakat, sehingga perdamaian dan harmonisasi sosial memiliki akar yang kuat. Tulisan ini pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk melakukan evaluasi kritis terhadap dinamika perdamaian di Kota Ambon yang telah terbentuk selama sepuluh tahun terakhir dan menganalisis bagaiamana keberlangsungannya di masa depan.

**Metode Penelitian**

Tulisan ini merupakan bagian dari laporan hasil penelitian tentang dinamika kontemporer perdamaian di Kota Ambon. Pengumpulan data-data lapangan dilakukan sepanjang bulan Juli hingga November 2015, dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian-penelitian kualitatif, seperti observasi lapangan, wawancara, studi dokumentasi dan *Focus Group Discussion (FGD*).[[4]](#footnote-5) Lebih dari 20 orang telah diwawancari dalam penelitian lapangan. Data-data yang dikumpulkan kemudian dinalisis dengan menggunakan model deskriptif interaktif yang ditawarkan Abdullah[[5]](#footnote-6). *Pertama*, menelaah dan mereduksi data-data yang telah dikumpulkan dalam penelitian dan dikelompokkan secara tematis sesuai topik-topik yang menjadi pertanyaan utama dalam penelitian. *Kedua,* memaparkan data (*display data*) dan mengkaji kaitan data dengan konteks eksternal, seperti lingkungan social, budaya, ekonomi, agama bahkan juga politik. *Ketiga,* memberikan kesimpulan akhir atas data-data yang telah dipaparkan dalam tulisan. Selanjutnya data-data tersebut dikelompokkan permasalahan penelitian dan dideskripsikan dalam tulisan, sehingga menghasilkan sebuah pemahaman yang utuh.

**Diskursus Teoritis Arsitektur Perdamaian**

Luc Reychland (2006), membicarakan teori arsitektur perdamaian (*architecture of peace*) dalam bukunya yang berjudul “*Researcher Peace Building Architectur”.*  Kajian Reychland merujuk kepada kehidupan masyarakat pasca konflik, yang dalam konteks Ambon cukup kontekstual untuk diterapkan. Terutama pada empat variabel yang menurut Reychland akan menentukan apakah sebuah proses perdamaian memiliki peluang untuk terus berkembang ke arah yang semakin positif.[[6]](#footnote-7)

*Pertama*, berfungsinya (efektifitas) saluran komunikasi yang memungkinkan terjadinya proses diskusi, klarifikasi, dan koreksi terhadap penyebaran informasi atau rumor yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar kelompok. Secara formal saluran komunikasi bisa ditemukan dalam bentuk forum warga, rembug desa, dan lain-lain yang secara reguler mempertemukan warga dari berbagai kalangan. Akan tetapi, forum yang bersifat informal yang tersedia melalui tempat-tempat berkumpul seperti warung kopi, warung makan, dan kelompok media alternatif bisa memiliki peran yang jauh lebih penting. Bagi Reychland, perdamaian adalah suatu situasi yang harus diciptakan, namun proses penciptaan perdamaian harus berlangsung dalam sebuah sistem komunikasi yang inklusif. Sebaliknya dalam tulisannya yang lain Reychland menyebut perdamaian yang dibangun secara eklusif dan dikuasai oleh bahasa-bahasa hegemonik menumbuhkan sebuah bangunan perdamaian yang rapuh[[7]](#footnote-8).

*Kedua,* adanya lingkungan sosial yang integratif yang secara psikologis mampu menciptakan sebuah iklim yang memungkinkan interaksi lintas kelompok (*inter-group*) dalam masyarakat. Beberapa ilmuan sosial seperti Putman (2001) dan Varsney (2003) menyebut lingkungan sosial integratif yang dibicarakan oleh Reychland sebagai bagian dari modal sosial (*social capital*) yang harus ada dalam masyarakat. Putnam membagi *social capital* dalam dua wujud, *bonding* (mengikat), dan *bridging* (menjembatani). Wujud pertama merujuk pada kecenderungan kelompok sosial membangun pola relasi secara terbatas dalam satu kelompok identitas, sebaliknya wujud yang kedua merujuk pada pola relasi yang menghubungkan kelompok-kelompok sosial yang berbeda.[[8]](#footnote-9) Hal ini dikonfirmasi pula oleh Varsney (2003) yang merumuskan pola relasi sosial yang sama yang ia sebut *civic association,* yaitu pola relasi multi etnik, baik yang terorganisasi (*organized civic network*) atau yang muncul dalam kehidupan sehari-hari *(everyday civic network*).[[9]](#footnote-10)

*Ketiga,* adanya tokoh masyarakat pendukung perdamaian dalam proporsi yang memadai (*critical mass of leadeship)*. Menurut Reychland tokoh masyarakat dari berbagai bidang seperti tokoh agama, politik, ekonomi, budaya, dan media memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian. Konflik Maluku secara umum menunjukkan bahwa eskalasi konflik menjadi kekerasan terjadi karena mobilisasi massa yang digerakkan oleh pemimpin yang berpengaruh, baik secara personal atau yang memiliki sumber daya politik-ekonomi. Oleh karena itu keberadaan pemimpin pendukung situasi damai dalam jumlah yang memadai sangat penting untuk mencegah eskalasi konflik. Jumlah yang “memadai” atau *critical mass* menurut Ahnaf, merujuk kepada kekuatan pengaruh tokoh pro-perdamaian yang lebih kuat meskipun jumlahnya lebih sedikit daripada tokoh pro-konflik[[10]](#footnote-11).

*Keempat,* terwujudnya struktur sosial politik yang mendukung terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Masyarakat yang damai memiliki situasi politik dan ekonomi yang stabil. Oleh sebab itu Reychland menekankan pentingnya transformasi sistem ekonomi dan politik untuk mendukung tegaknya perdamaian. Meskipun hal ini adalah situasi ideal yang tingkat ketercapaiannya bersifat relatif, tetapi sangat penting memperhatikan bahwa situasi damai (dalam pengertian bebas dari kekerasan fisik) tidak akan bertahan lama tanpa terciptanya struktur sosial, politik dan ekonomi yang adil.

Pada dasarnya sistem sosial yang dibayangkan Reychland melalui pilar-pilar perdamaian yang digambarkan, bermaksud untuk menjaga agar dinamika sosial masyarakat tetap berlangsung dalam keseimbangan (*ekuilibrium*). Sehingga konflik dan penyimpangan sosial dalam masyarakat dapat terus dikendalikan oleh sistem sosial yang telah terbentuk.[[11]](#footnote-12)

**Mengenal Wajah Kota Ambon Yang Masih Terbelah**

Menurut sejumlah penulis, konflik Ambon secara dramatis terjadi sepanjang tahun 1999 hingga 2004,[[12]](#footnote-13) telah mengakibatkan ribuan korban jiwa dan luka-luka, berbagai fasilitas publik dan rumah-rumah warga juga hancur atau hangus terbakar. Di sisi lain dampak konflik juga mengakibatkan masyarakat Maluku terpecah secara ekstrim menjadi dua komunitas, yaitu komunitas Muslim dan komunitas Kristen. Masyarakat yang tadinya tinggal dan menetap di suatu perkampungan yang terdiri dari beragam suku, ras dan agama mengungsi dan terpisah serta berkumpul atau menyatu dengan komunitasnya masing-masing. Setelah pelaksanaan Perjanjian Malino Tahun 2002, kota Ambon secara perlahan mulai kondusif, ditandai dengan menurunnya intensitas konflik, pemusnahan senjata, pembangunan fasilitas publik dan pulangnya para pengungsi yang selama ini mengungsi di berbagai tempat (baik di kota Ambon maupun wilayah lainnya di luar Maluku).

Namun para pengungsi menghadapi kenyataan traumatik dan rasa takut untuk kembali menempati rumah dan bertemu tentangga lama yang berbeda agama. Maka umumnya para pengungsi memilih pemukiman baru dengan agama yang homogen.[[13]](#footnote-14) Pengungsi Kristen kembali ke pemukiman yang mayoritas Kristen, demikian juga pengungsi Muslim yang mulai membangun rumahnya di pemukiman-pemukiman yang 100% beragama Islam. Sebagian pengungsi berinisiatif melakukan barter tempat tinggal dengan warga yang berbeda agama untuk memperoleh rumah baru di pemukiman yang seagama. Masyarakat Muslim umumnya menghuni wilayah di Waihaong, Silale dan yang tersebar di desa Batumerah yang penduduknya semakin padat. Beberapa rumah terpaksa harus dibangun di lereng-lereng gunung dan bukit yang membahyakan keselamatan dan merusak lingkungan dan kelestarian alam. Desa Batu Merah yang tidak luas dipaksa harus menerima ribuan pengungsi yang mencari tempat tinggal baru di desa Muslim tersebut. Sedangkan masyarakat Kristen memilih tinggal di Kec. Nusaniwe, seperti Latuhalat, Amahusu, Kudamati, Batu Gantung, Wainitu dan Mangga Dua. Wilayah Kristen juga mencakup Karang Panjang, Ahuru dan beberapa tempat lainnya di wilayah Galala hingga Paso di kecamatan Baguala. Secara faktual wilayah Kristen masih tampak lebih luas dibandingkan wilayah yang ditempati oleh komunitas Muslim, namun tetap saja wilayah Kristen juga merupakan pemukiman-pemukiman yang padat.

Segregasi sosial yang tercipta secara sosiologis memang sangat menghawatirkan. Pemukiman yang dibangun di atas identitas-identitas kelompok yang homogen dan eksklusif tentu secara sosiologis tidak sehat dan mudah menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan problem sosial hingga konflik. Sebabnya adalah tidak ada kelompok lain yang menjadi katalisator terhadap isu-isu konflik dan pertentangan yang muncul dalam masyarakat. Padahal diharapkan dalam lingkungan warga yang memeluk agama yang beragam, justru terjadi integrasi sosial dan peluang untuk saling melindungi. Petter Blau dan Schwartz (1984) menyebut pentingnya situasi yang heterogen untuk memperkuat loyalitas ganda dalam hidup bermasyarakat[[14]](#footnote-15). Maksudnya adalah seseorang yang beragama selain berafiliasi dengan tetangga yang seagama juga menjaga relasi dengan tetangga lain yang mungkin memiliki agama yang berbeda. Hal ini sebagai konsekwensi berada dalam hunian yang sama. Melalui hubungan yang heterogen masyarakat bisa saling menjaga dan melindungi.

**Dinamika Kontemporer Perdamaian di Kota Ambon**

Di bagian awal telah disebutkan bahwa konflik Ambon memperlihatkan suatu dinamika yang menarik, dimana sistem sosial yang terbentuk pasca konflik cenderung mencari pola baru dalam hubungan antar masyarakat. Perlahan tapi pasti, masyarakat Ambon (Muslim dan Kristen) mencoba menemukan bentuk-bentuk baru kesadaran tentang perdamaian. Kesadaran itu memunculkan bentuk-bentuk baru yang dapat diidentifikasi sebagai model arsitektur perdamaian yang terbentuk dalam masyarakat kota yang masih terbelah tersebut.

Diawali dengan desakan-desakan ekonomi yang memaksa masyarakat untuk melakukan kontak-kontak personal maupun kelompok di pusat-pusat ekonomi rakyat seperti pasar, lalu bergeser ke kantor dan ruang publik lainnya. Bersamaan dengan itu mulai muncul pula kesadaraan untuk terus memperkuat harmoni di tengah tantangan perbedaan. Masyarakat berupaya merivitalisasi simbol-simbol budaya untuk menemukan nilai-nilai baru yang dapat memperkuat kesimbangan sosial. Maka muncul kesadaran publik (*public awarness*) untuk saling mendekat dan membantu. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk arsitektur perdamaian yang muncul sebagai bagian dari apa yang disinggung oleh Luc Reychland (2006) dalam penjelasannya tentang arsitektur perdamaian.

***Dialog sebagai Model Komunikasi Inklusif***

Tampaknya segregasi sosial yang masih kuat, telah menumbuhkan kesadaran baru di masyarakat untuk mencari cara untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Komunikasi tersebut mengambil model dialog-dialog inklusif, baik untuk membicarakan kepentingan bersama maupun secara nyata mencari peluang untuk saling belajar. Proses dialog tersebut dipelopori oleh kelompok-kelompok keagamaan, *civil society*, komunitas akademik bahkan kekuatan-kekuatan politik. Sementara itu, komunitas-komunitas pemuda dari berbagai kelompok hobi dan minat juga mulai menyuburkan gerakan perdamaian, seperti fenomena jurnalisme damai, fotografer pro damai, penggemar hip-hop dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok tersebut cukup aktif dalam melakukan dialog yang kemudiaan menciptaakkan sebuah model kerukunan yang sangat aktif.

Lembaga-lembaga keagamaan di Ambon semakin intensif melakukan dialog-dialog lintas agama. Khususnya di kalangan Gereja Protestan Maluku, yang secara resmi telah menjadikan konsep-konsep dialog antar agama sebagai bagian dari pelayanan keagamaan.[[15]](#footnote-16) Kurikulum pendidikan dan pelatihan untuk para pendeta Kristen di Maluku, mulai menawarkan kajian intensif tentang dialog antar agama; Islam dan Kristen. Bukan lagi studi perbandingan agama yang mengandung cara pandang yang sedikit apologitik.

Kekuatan *civil society* yang tumbuh subur pasca konflik, juga tampil sebagai kekuatan yang mengkampanyekan model kerukunan yang aktif tersebut, sebagaimana yang diperlihatkan oleh sejumlah teolog dan aktifis yang tergabung dalam lembaga EL-AI-EM. Sejak tahun 2005 sejumlah aktifis lembaga tersebut fokus dalam mengkonsolidasikan dialog-dialog publik terkait dengan berbagai permasalahan sosial yang mengemuka, termasuk isu-isu teologis keagamaan. Dialog publik digelar untuk membangun persepsi bersama terhadap beberapa issue kontemporer yang bergulir dalam wacana publik sehari-hari di kota Ambon, seperti HIV/AIDS, korupsi dan penataan sampah. Selain itu dilakukan pula berbagai pertemuan terbatas lintas iman, untuk mencermati dan memetakan perkembangan situasi keamanan dari waktu ke waktu. Aktifis El-AI-EM, Abidin Wakano menyebutkan bahwa upaya membangun dialog adalah sebagai jalan untuk menumbuhkan watak-watak toleran dan kehidupan keagamaan di Ambon sebagai bagian dari kerukunan yang aktif[[16]](#footnote-17).

Peran serta masyarakat dari berbagai kelompok yang berbeda agama dalam event-event keagamaan seperti MTQ, Pesparawi dan partisipasi dalam mengamankan rumah ibadah pada saat hari raya dan natal adalah bentuk nyata dari kerukunan yang aktif tersebut. Masyarakat bukan hanya mau menghormati perbedaan, tetapi juga terlibat dalam aksi-aksi nyata untuk melembagakan nilai-nilai kerukunan sebagai jalan membangun kehidupan bersama yang toleran.

***Tampilnya Tokoh Lokal Sebagai “Provokator Damai”***

Terdapat sejumlah elit dalam masyarakat yang menjadi patron dan pemimpin yang didengar dan diikuti oleh masyarakatnya.[[17]](#footnote-18) Oleh sebab itu Reychland memandang penting peran elit-elit lokal sebagai varibael yang menentukan dalam memelihara perdamaian[[18]](#footnote-19). Dengan kata lain tersedianya aktor-aktor perdamaian yang terdiri atas elit-elit masyarakat Ambon yang semakin tercerahkan dalam proporsi yang semakin memadai (*critical mass leadership*) merupakan bagian penting dalam membaca arsitektur perdamaian di kota Ambon dewasa ini.

Para pemimpin lokal yang berperan sebagai provokator damai dapat ditemukan dalam dua kelompok, yakni pemimpin formal dan para pemimpin informal. Pemimpin formal biasanya adalah tokoh-tokoh yang berkuasa di ranah politik dan pemerintahan, mereka memegang jabatan-jabatan formal tertentu. Namun hal ini tidak membatasi mereka untuk turut memainkan peran penting dalam mendorong perdamaian. Sedangkan pemimpin informal adalah tokoh-tokoh masyarakat yang memimpin lembaga-lembaga adat dan lembaga-lembaga keagamaan.

Selama konflik Maluku, banyak sekali tokoh masyarakat, terutama yang informal yang mensponsori peperangan dan kerusuhan, mereka menjadi sosok yang sangat disegani sebab memimpin posko perang dan bantuan atas nama suku dan etnis. Merekalah yang menggerakkan masa dalam konflik, mereka menjadi leader di lapangan. Keberadaan tokoh informal tersebut membuat rasio tokoh yang pro konflik dan pro perdamaian menjadi tidak sebanding, sehingga upaya untuk memperkuat perdamaian mengalami kebekuan. Namun setelah konflik berhasil dihentikan, terjadi fenomena menarik; tokoh-tokoh informal pro-konflik berhasil dikembalikan ke kampung asalnya dan ini memberi ruang pada munculnya tokoh-tokoh po perdamaian, terutama yang berasal dari pemimpin adat dan agama.

Pemimpin adat yang dimaksud di sini adalah para *raja* yang memimpin *negeri-negeri* (desa) adat di kota Ambon, seperti Raja Batu Merah, Raja Soya dan Raja Passo, Raja Galala. Pasca konflik para raja tersebut telah tampil sebagai pemimpin lokal yang pro-perdamaian. Mereka berusaha menawarkan kearifan lokal sebagai bagian dari modal sosial perdamaian di Kota Ambon. Para raja mengambil inisiatif untuk merevitalisasi konsep persaudaraan lokal seperti *Pela* dan *Gandong* agar semakin kontekstual dan aktual dengan perubahan-perubahan sosial pasca konflik. Hal ini telah diwujudkan dengan ritual panas pela antar kampung yang dilakukan secara sistematis pasca konflik.

Pendekatan kultural merupakan salah satu pilihan kreatif untuk mendorong proses perdamaian yang memiliki nilai-nilai transformatif bagi masyarakat lokal di Ambon. Misalnya mempromosikan kembali spirit Pela dan Gandong di kalangan generasi muda melalui praktik-praktik pendidikan di sekolah. Sebagaimana kegiatan “angkat pela antar sekolah” atau “angkat pela antar kampus”yang diinisiasi sejumlah sekolah dan universitas di Ambon sejak tahun. Kegiatan ini selain memperkenalkan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi muda sejak dini, juga untuk memperkuat persaudaraan antar siswa. Bahkan secara praksis juga berfungsi sebagai modal sosial sekolah dalam mencegah kemungkinan terjadinya konflik antar pelajar (tauran).

Sementara itu, peran tokoh-tokoh agama di kota Ambon juga tidak bisa diabaikan, baik dari kalangan Islam yang tergabung di MUI maupun para pemimpin di Gereja Protestan Maluku. Secara umum mereka mulai meningkatkan dialog dan saling pengertian dan membangun konsep-konsep baru untuk mewujudkan toleransi antar agama, Islam dan Kristen. Dari kalangan Kristen Ketua Gereja Protestan Maluku Jhon Ruhulesin, Pendeta Jecky Manuputty, Pendeta Lies Marantika, dan lainnya. Para tokoh yang memimpin Gereja tersebut mulai mengadopsi pesan-pesan damai dalam materi khutbah dan kegiatan gereja. Tidak jarang mereka juga meminta masukan dan pandangan para tokoh Muslim terhadap kebijakan-kebijakan strategis gereja.

Adapun tokoh kelompok Muslim yang paling menonjol adalah kelompok pemuda yang dimotori oleh tokoh seperti Abidin Wakano dan tokoh-tokoh pemuda di Waehaong dan di Negeri Batu Merah. Menurut Abidin Wakano, di kalangan tokoh-tokoh Islam juga mulai tumbuh pemikiran tentang perlunya membangun kebersamaan untuk kehidupan bersama yang lebih baik. Hanya saja terdapat beberapa kendala terkait dengan kuantitasnya, struktur organisasi keagamaan Islam yang masih *rigid* dan dikuasai oleh orang-orang tua yang masih cenderung konservatif merupakan kendala tersendiri bagi proses perdamaian.

Sedang para akademisi yang berada di perguruan tinggi seperti IAIN, STAKPEN dan UKIM juga mempunyai peran dalam pencarian konsep dan gagasan akademik untuk mendukung kampanye tentang perdamaian di Maluku. Hubungan baik antar elit-elit lokal tersebut akan memberi kontribusi penting dalam memperkuat arsitektur perdamaian. Mereka secara tidak langsung membentuk jaringan perdamaian dalam konfigurasi sosial di Ambon.

***Eksistensi Ruang Publik dan Pembauran Sosial***

Upaya lain untuk menjembatani segregasi sosial adalah dengan membangun iklim sosial yang integratif dalam masyarakat. Hal ini memang sulit, sebab sebagaimana yang telah dijelaskan di muka, konflik telah membelah masyarakat kota Ambon dalam pemukiman-pemukiman yang terpisah berdasarkan agama. Maka untuk membangun integrasi sosial sebagaimana yang dipahami dalam paradigma struktural fungsional, masih merupakan sesuatu yang sulit. Maka meminjam Putnam (1993), langkah yang bisa dilakukan adalah membangun jembatan penghubung (*bridging*) dalam masyarakat yang sudah terbelah tersebut. Ruang-ruang publik (*public arena*) yang bebas bisa menjadi jembatan pembauran tersebut.

Ruang-ruang publik yang memiliki peran penting di Ambon adalah pasar, kantor, sekolah dan pusat-pusat pertemuan informal warga masyarakat di kota Ambon berupa rumah kopi yang secara alamiah memperkuat struktur perdamaian yang sedang tumbuh. Saat ini saja ada lebih dari 112 rumah kopi baru yang tumbuh di Ambon. Beberapa rumah kopi seperti Rumah Kopi Lela, Rumah Kopi Sibu-sibu, Rumah Kopi Joas, Rumah Kopi Hatukau adalah rumah-rumah kopi favorit yang ramai dikunjungi warga kota Ambon dari pagi hingga petang. Di rumah-rumah kopi tersebut warga Ambon yang berasal dari komunitas Islam dan Kristen serta berbagai etnis dan status sosial bisa bertemu, dari sekedar *hang out* bersama teman-teman kantor, melakukan pembicaraan bisnis bahkan lobi-lobi politik di antara politisi lokal. Dalam pergelaran pemilihan kepala daerah (pilkada), misalnya pemilihan Gubernur dan Walikota deklrasi damai sering mengambil setting warunh kopi.

Fenomena di atas menunjukkan semakin menguatnya ruang publik sebagai wadah perjumpaan kelompok-kelompok sosial dan politik yang beragam, dan oleh sebab itu harus dipelihara dan ditingkatkan. Di banyak tempat pembagian ruang publik yang berdasarkan identitas komunal berperan penting dalam terbentuknya sikap saling curiga dan kebencian. Hal ini karena jarak atau demarkasi ruang membatasi komunikasi antar etnik dan agama yang berbeda. Tanpa ruang komunikasi yang memungkinkan koreksi dan klarifikasi atas informasi atau pengetahuan negatif atas yang lain, benih-benih permusuhan dapat dengan mudah tumbuh kembali dan berkembang menjadi ledakan komunal. Namun hal tersebut sudah semakin sulit berkembang di Ambon, sebab secara alami terklarifikasi dalam interaksi yang semakin intensif di ruang-runag publik.

***Transformasi Sistem Ekonomi dan Politik yang Akomodatif***

Hal lain yang ditawarkan Reychland (2006) untuk melihat konteks arsitektur perdamaian adalah upaya untuk membangun struktur ekonomi yang memberdayakan semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat lokal Ambon yang selama ini terpinggirkan oleh suatu struktur ekonomi yang hegemonik. Transformasi ekonomi politik yang dimaksud di sini adalah sejauhmana mana struktur ekonomi dan politik lokal di Ambon telah mengalami perubahan yang subtansial dari kondisi sebelum dan semasa konflik ke suatu keasadaran dan tatanan baru yang membuka ruang partisipasi dan legitimasi bagi semua kelompok di Ambon.

Sejauh yang bisa diamati, tampaknya hal yang disebutkan di atas masih sulit untuk terjadi melalui perubahan-perubahan yang radikal, sebab sistem ekonomi informal di kota Ambon masih dikuasai kaum pendatang dari Bugis, Makasar, Buton dan Sumetara. Kelompok ini masih menjadi pedagang dominan yang menguasai aktifitas ekonomi lokal. Orang Bugis dan Makassar lebih menguasai pasar tekstil, barang-barang kebutuhan pokok masih cenderung dikuasai oleh pedagang Buton dan sektor rumah makan dan restoran yang masih dikuasai oleh kelompok masyarakat dari Sumatera Barat (Padang). Orang-orang Ambon yang hendak masuk ke dalam aktifitas ekonomi sebagaimana disebutkan di atas masih terasa kurang.

Namun demikian secara faktual, telah terjadi pergeseran cara pandang di kalangan orang Ambon asli. Orang-orang Ambon asli sudah mulai tertarik untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi informal, meskipun dalam jumlah yang masih kurang. Bahkan masyarakat Kristen Ambon yang selama ini menganggap kelompok pendatang menguasai sumber daya ekonomi lokal, secara perlahan mulai bersedia melibatkan diri dalam aktifitas ekonomi non formal. Mereka mulai terlibat dalam aktifitas perdagangan di pasar-pasar lokal seperti di Mardika dan Batu Merah. Mereka menjajakan berbagai panganan lokal, ikan dan berbagai sayuran dan buah yang dihasilkan dari kebun mereka atau yang dikumpulkan dari petani asal Buton di sekitar Ambon.

Kesadaran untuk mulai meningkatkan etos kerja dan meninggalkan mentalitas *ambtenar* tampaknya semakin tumbuh dalam praktik sosial ekonomi masyarakat kota Ambom masa kini. Bahkan secara mengagumkan masyarakat lokal di Ambon juga mulai bersedia mengerjakan berbagai pekerjaan informal yang selama ini seakan dianggap tabu untuk dikerjakan. Misalnya berkerja sebagai pengayu becak yang dianggap sebagai pekerjaan rendahan yang selama ini dikerjakan oleh kelompok pendatang dari Bugis dan Buton. Saat ini jamak ditemukan di jalan-jalan utama di kota Ambon para pengayuh becak, pengemudi ojek dan supir angkuatan kota yang berasal dari masyarakat lokal.

Adapun dalam konteks perubahan-perubahan sistemik dalam politik lokal ditunjukkan dengan semakin menguatnya politik konsensus untuk menciptakan distribusi kekuasaan politik yang melibatkan semua pihak. Konsensus lokal di Ambon selalu menuntut para politisi berbeda agama untuk berbagi peran dalam jabatan-jabatan politik dan birokrasi lokal. Jabatan utama seperti walikota dan wakil walikota selalu dijabat oleh figur politisi yang berbeda agama, seperti walikota saat ini yang dijabat oleh Richard Louhanapesy (Kristen) dan Syam Latuconsina (Muslim). Selain itu pengisian jabatan-jabatan di birokrasi juga semakin memperhatikan aspek keseimbangan berdasarkan kekuatan-kekuatan agama. Intinya adalah konsesus politik tentang keseimbangan berdasarkan agama, mendorong transformasi politik sehingga politik tidak bersifat hegemonik dan hanya dikuasai secara defacto oleh satu kelompok agama tertentu saja. Hal ini untuk mengeliminiasi kecemburuan politik yang dapat memicu pertentangan dan konflik dalam masyarakat. Sebab sebagaimana telah diungkap dimuka bahwa salah satu akar konflik Maluku adalah fakta bahwa perebutan kekuasan politik yang mengambil setting keagamaan.

***Kampanye Pluralisme dan Multikulturalisme.***

Pluralisme dan multikulturalisme pada dasarnya adalah dua wacana baru yang sedang berkembang di dunia sebagai respon atas pelbagai konflik yang mengatasnamakan agama, etnis dan kelompok kepentingan yang mengemuka selama satu dekade terakhir. Pluralisme dan multikulturalisme pada dasarnya berkaitan dengan keanekaragaman agama, etnis dan budaya, tetapi lebih dari itu juga berkaitan dengan kesederajatan. Kemunculan pluralisme didasari oleh upaya untuk menghilangkan klaim kebenaran (*truth clime)* yang sering mengarah pada proses menyingkirkan kelompok lain.[[19]](#footnote-20) Dalam konteks Ambon dewasa ini, upaya menghadirkan pluralisme dan multikulturalisme sebagai kerangka konseptual untuk membangun perdamaian di Ambon juga semakin intens dilakukan oleh berbagai lembaga, seperti LSM, lembaga keagamaan dan perguruan tinggi. Lembaga-lembaga tersebut berusaha menginternalisasi wacana pluralisme dan multikulturalisme baik dalam konteks akademik maupun secara praksis dalam perikehidupan masyarakat lokal. Mereka menjadikannya sebagai tema kampanye, slogan agama, visi kelembagaan atau perbincangan kebudayaan di ruang-ruang publik dan tentu saja di dunia akademik. Bahkan ada universitas yang secara resmi mengadopsi kedua konsep tersebut sebagai bagian dari visi dan misi lembaga.

Isu pluralisme digunakan secara demonstratif oleh Gereja Protestan Malaku (GPM) dalam membingkai dialog-dialog keagamaan. Pluralisme biasanya disandingkan dengan praktik-praktik tentang kearifan lokal seperti Pela dan Gandong. Ketika merayakan ulang tahunnya yang ke-80 pada tahun 2015, GPM mengusung tema pluralisme yang dituangkan dalam naskah-naskah gereja hingga kampanye publik.[[20]](#footnote-21) Wacana pluralisme dianggap sebagai ekstraksi dari pengalaman konflik yang panjang. Lis Marantika dari Gereja Protestan Maluku (GPM) menyebutkan bahwa pluralisme yang diusung gereja protestan Maluku sejalan dengan semangat keagamaaan orang bersaudara dan pesan-pesan moral dalam kita suci[[21]](#footnote-22). Apa yang disebut Lis Marantika tentu memperoleh pembenaran empirik jika melihat keseluruhan proses tranformasi Gereja Protestan Maluku pasca konflik yang secara nyata terus melakukan sosialisasi untuk mendorong pemahaman tentang pentingnya sikap pluralis dalam praktik keberagamaan di Maluku. Bagi para pemimpin GPM, masyarakat Ambon dan Maluku dapat menjadikan pluralisme sebagai narasi baru untuk merekatkan diri dalam keberagaman. Dan proses tersebut dilakukan melalui dialog yang egaliter, dan revitalisasi atas nilai-nilai kearifan lokal di Maluku dan tentu saja penafsiran yang progresif dan kontekstual atas teks-teks dalam kitab suci. Sama dengan Gereja, salah satu perguruan tinggi Kristen di Maluku atau Universitas Kristen Maluku (UKIM) juga mengkapanyekan diri sebagai “Kampus Orang Basudara”, yang menurut keterangan rektornya adalah kampus yang akan memberi pengetahuan untuk semua mahasiswa tanpa memandang agama dan etnisnya[[22]](#footnote-23).

Sementara di kalangan Islam terus dikampanyekan konsep tentang multikulturalisme, sebagai wacana sosial untuk mengekspresikan semangat persaudaraan. Bahkan Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon memasukkan multikulturalisme sebagai visi utama dan tema sentral yang membingkai keseluruhan aktifitas akademik di IAIN Ambon. Multikulturalisme diadopsi dalam kurikulum akademik semua prodi, kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan akademik lainnya. Sebagai implementasi dari visi multikulturalisme, maka pada tahun 2015, sejumlah mahasiswa dari Jurusan Sosiologi Agama IAIN Ambon dikirim untuk melakukan magang profesi di Gereja Protestan Maluku (GPM). Magang di gereja merupakan salah satu terobosan penting yang dilakukan IAIN dalam membangun pengertian dan pengetahuan mahasiswa terhadap keragaman dan perbedaan. Dengan belajar pada perbedaan secara langsung (*by experiance*) mahasiswa diharapkan memiliki sikap dan karakter yang menghargai perbedaan dan dapat bersikap ramah terhadap kelompok lain yang memiliki keyakinan yang berbeda. Sebagai bentuk lain dari pratik multikulturalisme, pada tahun 2015 ini, dan untuk pertamakalinya IAIN Ambon menerima mahasiswa beragama Kristen. Menurut Dr. Subair yang juga Ketua Jurusan Sosiologi Agama IAIN Ambon, kegiatan akademik untuk menumbuhkan wawasan multikultural akan semakin ditingkatkan. Ia bahkan telah merencanakan untuk tahun 2016, akan mendorong program pertukaran mahasiswa IAIN Ambon dengan STAKPEN Ambon. Bentuknya adalah mengirim mahasiswa untuk mengikuti kuliah-kuliah yang secara kurikulum terdapat kesamaan antara IAIN Ambon dan STAKPEN Ambon.

Setelah satu dekade berlalunya konflik Maluku, tampak bahwa konsepsi arsitektur perdamaian sebagaimana dibayangkan Luc Reychland (2006) telah yang tercipta secara gradual dan alamiah. Hal ini meningkatkan kepercayaan (*trust*) antar warga masyarakat. Kepercayaan membuat kelompok-kelompok yang berbeda dan segregatif dalam masyarakat tidak lagi terlibat dalam aksi kekerasan dan serangan kepada yang lain berdasarkan motif-motif keagamaan, sebagaimana yang terjadi pada saat konflik. Beberapa peristiwa kriminalitas yang terjadi tidak akan mudah memicu kekerasan yang bersifat komunal.

Dalam konteks arsitektur perdamaian yang subtantif tentu tidak menafikkan adanya konflik dan ketegangan sebagai suatu fenomena osial yang *omni present* dalam masyarakat. Namun sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat demokratis, konflik hanyalah sebagai bentuk dinamisasi sosial. Sistem sosial yang baik pasti akan mampu menjaga agar persaingan dan kontestasi tidak mengarah kepada konflik yang destruktif. Perkembangan konflik akan ternetralisir melalui struktur-struktur perdamaian yang telah tercipta dalam masyarakat. Sebagaimana telah dibahas dalam kajian ini, arsitektur perdamaian yang dimaksud adalah sistem komunikasi inklusif, media pembauran, pemimpin-pemimpin lokal pro damai dan struktur sosial politik dan ekonomi yang akomodatif dan adil untuk semua orang. Ini adalah modal sosial perkembangan perdamaian di Kota Ambon, meskipun harus pula disadari tentang potensi-potensi konflik yang juga masih menghantui.

**Tantangan Radikalisme Agama dan Politik Identitas**

Meskipun tulisan ini telah menunjukkan berbagai perkembangan positif tentang perdamaian di kota Ambon beserta nilai-nilai baru yang menyertainya. Namun bersamaan dengan itu masih terdapat beberapa potensi konflik yang perlu diwaspadai. Terutama terkait dengan ancaman radikalisme agama dan praktik politik identitas.

Di kalangan Islam jaringan radikalisme masih memiliki akar-akar kultural yang melembaga sejak konflik Maluku. Gerakan-gerakan yang pernah dibangun oleh kelompok radikal seperti Lasykar Jihad maupun Mujahidin masih meninggalkan basis-basis kultural yang mewarisi cara pandang keagamaan yang cenderung eksklusif.[[23]](#footnote-24) Kelompok-kelompok ini lahir dari para eks-kombatan yang tidak pulang ke daerah asalnya. Mereka menetap di Ambon dan membangun gerakan dan kelompok keagamaan baru yang ternyata berbeda dengan gerakan agama yang sudah ada sebelum konflik. Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) gerakan ini menamakan diri gerakan salafi yang memang tidak dapat dikategorikan sebagai gerakan terorisme, tetapi dalam jaangka panjang bila tidak ditangani dengan hati-hati dalam jangka panjang akan mengarah kepada eksklusifisme radikal yang keras dan kaku[[24]](#footnote-25).

Meskipun tidak terlalu menonjol, tetapi di kalangan Kristen juga terdapat kelompok keagamaan yang memiliki pandangan keagamaan yang cenderung eksklusif pula. Mereka menampilkan pemahaman Kristiani yang cenderung berbeda dengan yang dikembangkan oleh Gereja Protestan Maluku. Kelompok-kelompok ekslusif Kristen cenderung bersikap agresif dan dianggap kurang toleran. Yance Z. Rumahuru menyebut kelompok Kristen Radikal berasal dari kelompok gereja Charismatis dan Pantekosta yang biasanya agresif dalam penyebaran misi[[25]](#footnote-26). Dalihnya adalah mencari domba-domba yang hilang di Maluku. Bahkan terkadang mereka juga mendenominasi Kristen lain yang tidak sealiran. Namun tampaknya kelompok ini tidaklah dominan, sehingga pandangan-pandangan keagamaannya kurang berkembang dalam wacana keagamaan di Maluku.

Selain radikalisme agama, tantangan lain yang perlu diwaspadai adalah fenomena politik identitas. Politik identitas pada dasarnya merupakan bagian dari upaya etnis, komunitas agama, dan budaya untuk dapat terakomodasi dalam sistem politik lokal. Namun hal ini mencemaskan bila ditampilkan di Ambon yang secara faktual baru sembuh dari luka konflik. Fenomena politik identitas dapat memunculkan kembali sentimen-sentimen keagamaan dan etnis yang mudah menimbulkan mobilisasi kekerasan. Pola operasionalisasi politik identitas ini dapat kita jumpai pada realitas yang terjadi di masyarakat yang ditunjukkan dengan banyaknya perbenturan kepentingan dan fenomena ego sektoral di Ambon, antara lain: *Pertama*, Politik identitas ditampakkan dengan maraknya isu etnisitas dan gejala primordialisme yang diusung melalui isu-isu agama dan etnis dalam moment penting seperti pilkada dan pemilu legislatif. Demikian juga isu etnis asli dan pendatang, yang mengandung muatan mayoritas dan minoritas. *Kedua,* dalam konteks Maluku politik identitas juga memanfaatkan ekspresi-ekpresi keagamaan yang secara tidak terlekakkan mengandung tendensi ”menyingkirkan” kelompok lain yang dianggap minoritas.

Berdasarkan pada kedua pola operasionalisasi tersebut, politik identitas tampaknya cenderung mendistorsi wawasan keagamaan inklusif yang hendak dibangun di Maluku. Apalagi dalam satu dekade terakhir, upaya meningkatkan peran politik berbagai kelompok lokal di kota Ambon terus mengambil setting politik Identitas[[26]](#footnote-27). Pilkada telah menggoda elit dan praktisi politik untuk mengkonsolidasikan kepentingan politik atas nama agama dan etnis yang sebetulnya cukup berbahaya bagi bangunan perdamaian.

**Kesimpulan**

Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat berbagai permasalahan terkait dengan pembangunan perdamaian, namun dinamika sosial yang terjadi memberikan harapan bahwa arsitektur perdamaian semakin menguat di kota Ambon. Berkaitan dengan dinamika tersebut, maka ada beberapa catatan yang bisa dijadikan kesimpulan penting. *Pertama*, proses pembangunan perdamaian di kota Ambon telah berlangsung secara partisipatif dalam berbagai lini kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya. *Kedua,* dalam perspektif Arsitektur Perdamaian yang dibayangkan Reychland, maka perdamaian di Kota Ambon memiliki potensi yang cukup baik untuk berkembang menjadi sebuah struktur yang semakin kuat di masa depan. Hal ini ditandai dengan menguatnya model-model dialog dan komunikasi sosial antar warga yang semakin inklusif. Terutama yang digagas oleh lembaga-lembaga keagamaan, *civil society* dan lembaga-lembaga adat. Perkembangan ruang publik baru seperti pasar dan warung-warung kopi juga menjadi media pembauran yang semakin penting untuk mempertemukan warga dari berbagai kelompok beragama di kota Ambon. Sementara itu, munculnya tokoh-tokoh perdamaian baik dari kalangan Muslim maupun Kristen yang mengkampanyekan nilai-nilai persaudaraan dan perdamaian, menjadi menjadi teladan yang poisitif bagi masyarakat luas untuk berdamai dengan orang-orang yang berbeda agama dan budaya.

*Ketiga,* penelitian ini juga mengingatkan bahwa meskipun arsitektur perdamaian di Ambon semakin kuat dan berkembang ke arah yang semakin positif, namun masyarakat kota Ambon masih harus tetap mewaspadai tumbuhnya paham-paham keagaman radikal yang pada level tertentu masih eksis dalam kehidupan masyarakat; baik Muslim maupun Kristen. Pada saat yang sama pesona politik identitas yang muncul dalam momentum politik lokal seperti pemilu dan Pilkada juga harus dihadapi dengan hati-hati, sebab secara tidak langsung bisa melahirkan sikap primordial dan enosentrisme yang berbahaya bagi pembangunan perdamaian di masa depan.

**AKNOWLEDGMENT**

Paper ini merupakan pengembangan dari penelitian tentang perdamaian di kota Ambon yang dibiayai oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI. Oleh sebab itu saya ingin mengucapkan terimakasih kepada DIKTIS Kementerian Agama RI atas bantuan biaya yang telah diberikan. Saya juga ingin menyampaikan terimakasih kepada para kolega di Jurusan Sosiologi Agama IAIN Ambon; Zein Nuhuyanan dan Istiqomah yang telah banyak memberi komentar awal dan masukan terhadap draft awal dari paper ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahnaf, Mohammad Iqbal. 2013. *Mengelola Keragaman dari Bawah, Ko-Eksistensi Santr-Tionhoa di Lasem Kawa Tengah.* (Yogyakarta; Sekolah Pascasarjana UGM).

Bertrand, Jacques. 2004. *Nationalism anda Ethnic Conflict in Indonesia*. (Newyork: Cambridge University Press).

Blau, Peter Michael dan Joseph E. Schwartz. 1984.*Crosscutting Social Circles: Testing a Macrostructural Theory of Interrelation*. (Orlando: Academic Press).

Denzin, N.K. dan YS. Lincoln. 1994. *Handbook of Qualitatif Research*. (California: Sage Publication)

Eisenstadt, S. N and L. Roniger. 1984. *Patrons, Clients and Friends*; *Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society* (Cambridge University press London)

Ernas, Saidin. 2012. *Policy of Social Conflict Resolution; Implementation of The Malino Agreemen*t, Journal of Govermant and Politics, volume 3, Nomor 2, Agustus 2012.

L. Eck, Diana. 2001. *New Religious America; How a Cristian Country has Become The World Most Religiousy Diversity Nation* (New York; The Continum Internastional Publishing)

Parekh, Biku. 2008. *Rethinking Multiculturalism, Keragaman Budaya dan Teori Politik*. (Yogyakarta: Kanisius).

Pranawati, Rita (*edit.*). 2011. *Kebebasan Beragama dan Integrasi Sosial*. (Jakarta: Center for Study of Religion and Culture (CSRC)

Prasetyo, Eko. 2002. *Memahami Wajah Para Pembela Agama,* *Potret Gerakan Islam dalam Pusaran Arus Global*. (Yogyakarta: Insist)

Robert Putnam, 1993. *Making Democracy Work.* (USA: Princeton)

Reychland, Luc. 2006. *Researcher Peace Building Architectur.*  (Leuven: Centre for Peace Research and Strategic Studies)

------------- 1999. *Democratic Peace-Building and Conflict Prevention: The Devil is in the Transition*, (Leuven; University Press)

Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Jakarta; Rajawali Press).

Rozi, Syafuan, dkk. 2006. *Kekerasan Komunal; Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LIPI).

Subair, dkk. 2008. *Segregasi Pemukiman Berdasarkan Agama.* (Yogyakarta; Graha Gur)

Tomsa, Dirk. 2008. *Electoral Democracy in Devided Society; The 2008 Gibernatorial Electon in Maluku, Indonesia.* Journal of *South East Asia Research*, 17, 2, pp 229–259.

Varshney, Asutosh. 2003. *Etnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*. (New Haven: Yale University).

1. Saidin Ernas, *Policy of Social Conflict Resolution; Implementation of The Malino Agreemen*t, Journal of Govermant and Politics, volume 3, Nomor 2, Agustus 2012. [↑](#footnote-ref-2)
2. Luc Reychland, *Researcher Peace Building Architectur.*  (Leuven: Centre for Peace Research and Strategic Studies, 2006), h. 7 [↑](#footnote-ref-3)
3. Biku Parekh. *Rethinking Multiculturalism, Keragaman Budaya dan Teori Politik*. (Yogyakarta: Kanisius, 2008), h. 118 [↑](#footnote-ref-4)
4. N.K. Denzin dan YS. Lincoln, *Handbook of Qualitatif Research*, (California: Sage Publication. 1994), h. 12 [↑](#footnote-ref-5)
5. Irwan Abdullah, *Handout Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta; Sekolah Pascasarjana UGM. 2007), 21-217 [↑](#footnote-ref-6)
6. Luc Reychland, *Researcher Peace Building Architectur.*  (Leuven: Centre for Peace Research and Strategic Studies, 2006), h. 21-37 [↑](#footnote-ref-7)
7. Luc Reychland. *Democratic Peace-Building and Conflict Prevention: The Devil is in the Transition*, (Leuven; University Press, 1999) h. 24. [↑](#footnote-ref-8)
8. Robert Putnam, *Making Democracy Work.* (Princeton; 1993), h. 163-181. [↑](#footnote-ref-9)
9. Asutosh Varshney, *Etnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*. (New Haven: Yale University, 2003). [↑](#footnote-ref-10)
10. Mohammad Iqbal Ahnaf, *Mengelola Keragaman dari Bawah, Ko-Eksistensi Santri-Tionghoa di Lasem Kawa Tengah*. (Yogyakarta; Sekolah Pascasarjana UGM, 2013), h. 191 [↑](#footnote-ref-11)
11. George Ritzer dan Douglas J. Goodman. *Sociological Theory,* diterjemahkan oleh Nurhadi, “Teori Sosiologi; dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Moderen”. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), h. 258. [↑](#footnote-ref-12)
12. Syafuan Rozi, dkk. *Kekerasan Komunal; Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LIPI, 2006), h. 12 [↑](#footnote-ref-13)
13. Subair, dkk. *Segregasi Pemukiman Berdasarkan Agama.* (Yogyakarta; Graha Guru, 2008), h. 73 [↑](#footnote-ref-14)
14. Lihat kajian Peter Michael Blau dan Joseph E. Schwartz,*Crosscutting Social Circles: Testing a Macrostructural Theory of Interrelation* (Orlando: Academic Press. 1984) [↑](#footnote-ref-15)
15. Wawancara dengan Pendeta Jecky Manuputy. Ambon, 19 September 2015. [↑](#footnote-ref-16)
16. Wawancara dengan Abidin Wakano, Ambon, 28 Agustus 2015 [↑](#footnote-ref-17)
17. Eisenstadt, S. N and L. Roniger, *Patrons, Clients and Friends*; *Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society* (Cambridge University press London, 1984) [↑](#footnote-ref-18)
18. Luc Reychland, *Researcher Peace Building Architectur.*  (Leuven: Centre for Peace Research and Strategic Studies, 2006), h. 21-37 [↑](#footnote-ref-19)
19. Diana L. Eck , *New Religious America; How a Cristian Country has Become The World Most Religiousy Diversy Nation* (New York; The Continum Internastional Publishing, 2001), h. 27. Lihat juga tulisan Budi Munawar Rachman, *Argumen Islam untuk Pluralisme* (Jakarta; PT. Gramedia, 2010) [↑](#footnote-ref-20)
20. *Term of reverence* *(TOR*) tema kegiatan Ulang Tahun GPM Maluku yang ke-80 yang dipusatkan di Dobo Kepulauan Aru, September 2015. [↑](#footnote-ref-21)
21. Wawancara dengan Pendeta Lis Marantika. Dobo, 3 September 2015. [↑](#footnote-ref-22)
22. Wawancara dengan Agustinus Batlajery. Ambon, 11 September 2015 [↑](#footnote-ref-23)
23. Lihat tulisan Eko Prasetyo, *Memahami Wajah Para Pembela Agama,* *Potret Gerakan Islam dalam Pusaran Arus Global*. (Yogyakarta: Insist, 2002). [↑](#footnote-ref-24)
24. Laporan BNPT dan Policy Brief, *Memperkuat Inisiatif Islam Moderat dan Mendorong Peran Gerakan Salafi tentang Isu Anti-Terorisme di Maluku*. TT, [↑](#footnote-ref-25)
25. Wawancara dengan Yance Z. Rumahuru. Ambon, September 2015 [↑](#footnote-ref-26)
26. Dirk Tomsa, *Electoral Democracy in Devided Society; The 2008 Gubernatorial Electon in Maluku, Indonesia.* Journal of *South East Asia Research*, 17, 2, pp 229–259, 2008. [↑](#footnote-ref-27)